Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 2 No. 1, Mei 2020 (3-17) doi: 10.24198/padjir.v2i1. 25602

Perdagangan Internasional sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari *Power*

Anton Pratomo Sunu

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Indonesia; email: anton.pratomo@ui.ac.id

Dikirim:Direvisi:Diterima:Dipublikasikan:8 Januari 202029 Februari 202025 Mei 202031 Mei 2020

Keywords

International Trade, Economic Institution, Power

Kata Kunci

Institusi Ekonomi, Perdagangan Internasional, Power

ABSTRACT

Joseph S. Nye Jr. in his book "The Future of Power" This article explains how institutions and international trade regimes are the embodiment of the second and third aspects of power according to Nye. The implementation of international trade agreement negotiations often brings the interests of developed industrial countries. Developing countries are often in the position to accept articles submitted by developed industrial countries in negotiations. Developing countries after agreeing to and ratifying international trade agreements often become limited by these international trade agreements, because they must fulfill the commitments given in international trade agreements. The first part of this article will explain three aspects of power by Nye with an emphasis on the second and third aspects. The second part will explain how power relations in international trade and international institutions in general. The last part will explain how international trade is an embodiment of the second and third aspects of power. Developing countries must be careful in negotiating free trade cooperation agreements, and continue to prioritize national interests without violating international norms.

ABSTRAK

Joseph S. Nye Jr. dalam bukunya "The Future of Power" pada tahun 2007, menjelaskan mengenai 3 aspek dari power. Artikel ini menjelaskan bagaimana institusi dan rejim perdagangan internasional merupakan perwujudan dari aspek kedua dan ketiga dari power menurut Nye. Pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional seringkali membawa kepentingan negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang lebih banyak dalam posisi menerima artikelartikel yang diajukan oleh negara-negara industri maju dalam perundingan. Negara-negara berkembang setelah menyetujui dan meratifikasi perjanjian perdagangan internasional seringkali menjadi memiliki ruang gerak yang dibatasi oleh perjanjian perdagangan internasional tersebut, karena harus memenuhi komitmen yang diberikan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut. Bagian pertama artikel ini akan menjelaskan tiga aspek dari power oleh Nye dengan penekanan pada aspek kedua dan ketiga. Bagian kedua akan

dijelaskan bagaimana relasi power dalam perdagangan internasional dan institusi internasional pada umumnya. Pada bagian terakhir akan menjelaskan bagaimana perdagangan internasional merupakan perwujudan aspek kedua dan ketiga dari power. Sehingga negara-negara berkembang harus berhatihati dalam melakukan perundingan perjanjian kerjasama perdagangan bebas, dan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa melanggar aturan-aturan internasional yang berlaku.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi pada masa sekarang ini menyebabkan makin banyak terlibat dalam negara-negara yang perdagangan internasional, melalui berbagai macam mekanisme, multilateral, regional maupun bilateral. Pengkritik globalisasi dan rejim perdagangan internasional menuduh bahwa mekanisme yang ada di dunia saat ini lebih menguntungkan bagi negara-negara industri maju. Meskipun demikian negaraberkembang tetap melakukan negara perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara maju. Perjanjian perdagangan internasional yang berlaku saat ini adalah hasil kesepakatan dan tanpa paksaan, kecuali aturan-aturan yang dibuat setelah tercapai kesepakatan.

Mekanisme yang berlaku di dunia pada saat ini, bagaimana negara-negara "seharusnya berperilaku", mengikuti tata cara dan norma yang ditentukan oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang harus mengikuti tata aturan tersebut. Aturan main yang sudah "disepakati" bersama ini membatasi ruang gerak dari negara-negara yang saling bersepakat, seringkali negara-negara berkembang kesulitan dalam mengikuti dan menegosiasikan ulang bagaimana mereka harus berperilaku, sehingga cenderung untuk mengikuti tata aturan yang sudah disepakati tersebut.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme institusi perdagangan internasional yang berlaku saat ini merupakan perwujudan dari aspek kedua dan ketiga dari *power* (Nye 2007). Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka dengan menggunakan artikelartikel ilmiah dan buku yang membahas

mengenai perdagangan internasional dan relasi power dalam institusi internasional sebelumnya. Data yang digunakan adalah data perkembangan perdagangan antar negara berkembang dengan negara yang pernah menjajahnya selama kurun waktu 2016-2018 terakhir.

KERANGKA KONSEPTUAL Tiga Aspek *Power*

Power, secara umum, dapat dikatakan sebagai kemampuan dari suatu aktor untuk membuat aktor lain melakukan sesuatu yang tidak hendak dilakukan oleh aktor lain tersebut (Keohane & Nye, 2012). Pada tahun 2007 Joseph S. Nye, Jr. menyebutkan ada tiga aspek dari power yaitu:

- Negara A menggunakan ancaman atau hadiah untuk merubah perilaku negara B. Negara B mengetahuinya dan merasakan dampak dari power negara A.
- Negara A mengendalikan agenda tindakan dengan cara-cara yang membatasi pilihan dan strategi negara B. Negara B dapat tidak mengetahui hal ini dan tidak menyadari penerapan power dari negara A.
- 3. Negara A menciptakan dan membentuk persepsi dan pilihan negara B. Negara B biasanya tidak menyadari pembentukan persepsi ini.

Aspek pertama adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Robert Dahl pada 1950-an, dan masih digunakan secara luas meskipun hanya mencakup sebagian dari perilaku *power*. Aspek pertama dari *power* ini fokus pada kemampuan untuk membuat pihak lain bertindak dalam cara-cara yang berbeda dari

pilihan dan strategi awal mereka. Untuk mengukur *power*, harus diketahui seberapa kuat pilihan awal dari satu pihak dan seberapa jauh dirubah oleh usaha-usaha dari pihak lain.

Pada tahun 1960-an, Peter Bachrach dan Morton Baratz mengatakan bahwa definisi dari Dahl belum mencakup apa yang mereka katakan sebagai aspek kedua dari power. Dahl dalam mendefinisikan power belum memperhatikan dimensi dari "framing" dan "agenda setting". Jika ide/gagasan dan institusi dapat digunakan untuk membentuk agenda dalam cara yang membuat pilihan pihak lain menjadi tidak relevan, maka tidak diperlukan untuk mendorong memaksanya. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk membentuk pilihan dari pihak lain dengan mempengaruhi keinginan pihak lain akan apa yang benar atau dapat dicapai. "Agenda-Framing" fokus pada kemampuan untuk menjaga isu-isu yang tidak sesuai dengan kepentingan suatu aktor berada diluar pembicaraan. Aktor-aktor kuat dapat memastikan aktor-aktor yang lebih lemah tidak hadir dalam pembicaraan, atau jika ada, aturan permainan telah diatur oleh mereka yang ada dari awal. Mereka yang berada dalam lingkup aspek kedua dari power ini dapat menyadari atau tidak akan hal ini. Jika mereka menerima legitimasi dari hal-hal vang dari institusi membentuk agenda lingkungan sosial, mereka dapat tidak merasa terlalu terkekang oleh aspek kedua dari power. Namun, jika agenda tindakan dibatasi oleh ancaman atau pemaksaan atau dijanjikan sesuatu, maka hal tersebut merupakan aspek pertama dari power. Persetujuan dari target akan legitimasi dari agenda adalah yang membuat aspek kedua dari power ini lebih merupakan bentuk kerjasama dan membentuk sebagian dari soft-power – kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan kooperatif seperti membentuk agenda, bujukan, dan memunculkan daya tarik positif.

Steven Lukes pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa ide dan kepercayaan juga

membantu membentuk pilihan awal pihak lain. Dalam pendekatan Dahl, satu pihak dapat mempraktekkan *power* kepada pihak lain dengan membuat pihak lain melakukan hal yang berlainan dari apa yang pihak lain ingin lakukan, dengan kata lain, dengan merubah keadaan dari pihak lain, pihak A dapat merubah pilihan strategi dari pihak lain. Namun pihak A juga dapat mempraktekkan power kepada pihak lain dengan menentukan kebutuhan pihak lain. Pihak membentuk pilihan-pilihan dasar atau awal dari pihak lain, tidak hanya dengan merubah situasi dimana pihak lain merubah strateginya untuk mencapai tujuannya. Jika pihak A dapat membuat pihak lain menginginkan hasil yang sama dengan pihak A, maka tidak perlu untuk merubah keinginan awal mereka, Lukes menyebutnya sebagai "aspek ketiga dari power". Namun, sangatlah sulit memastikan kepentingan pihak lain. Sehingga terkadang sulit untuk mengetahui sejauh mana kesukarelaan pihak lain. Kekuatan militer membangkitkan rasa kagum sehingga menarik pihak lain, sehingga dapat juga menjadi sumber tidak langsung dari kekuatan kooptasi, namun jika kekuatan militer digunakan secara koersif, maka kekuatan militer merupakan aspek pertama dari power.

Aspek kedua dan ketiga dari power ini dapat dikatakan sebagai hal yang umum, tersembunyi, dan tidak terlihat, menyebabkan kesulitan dalam menentukan sumber dari power. Aspek kedua dan ketiga dari power merupakan perwujudan dari power struktural. Beberapa menggunakan power yang merefleksikan keputusan sadar dari aktor-aktor tertentu, sedangkan yang lain merupakan hasil dari konsekuensi yang tidak diniatkan dan kekuatan sosial yang lebih besar.

Pada politik global, beberapa tujuan yang dicari negara lebih sesuai dengan aspek kedua dan ketiga dibanding aspek pertama. Arnold Wolfers membedakan antara tujuan posesional – tujuan yang spesifik dan nyata – dan tujuan kondisional, yang seringkali struktural dan tidak nyata. Sebagai contoh, akses ke sumber

daya atau menyamakan hak atau perjanjian perdagangan merupakan tujuan posesional, sementara mempromosikan sistem perdagangan terbuka, pasar bebas, demokrasi, atau hak asasi manusia merupakan tujuan kondisional. Ketertarikan dan persuasi akan soft power dapat memiliki dimensi agentik dan struktural. Sebagai contoh, sebuah negara dapat mencoba menarik negara lain melalui tindakan seperti diplomasi, namun juga dapat saja menarik negara lainnya melalui dampak struktural, dapat dikatakan menyerupai efek kota yang gemilang diatas bukit yang menarik perhatian.

Alasan lain untuk tidak hanya memperhatikan aspek pertama dari power adalah, dengan melakukan hal tersebut akan menghilangkan perhatian kepada jaringan, yang merupakan hal penting dari kekuatan struktural di abad keduapuluh satu. Jaringan menjadi sangat penting di era informasi, dan posisi dalam jaringan sosial dapat menjadi sumber kekuatan penting. Sebagai contoh, dalam jaringan "hub and spokes", power dapat berasal dari peran sebagai penghubung komunikasi. Jika anda berkomunikasi dengan teman anda melalui saya, hubungan yang demikian memberi saya kekuasaan. Jika titiktitik dari jaringan tidak terhubung secara langsung, ketergantungan akan komunikasi melalui penghubung dapat membentuk agenda mereka. Pada pengaturan jaringan yang lebih kompleks, para ahli menunjukkan pentingnya lubang struktural yang mencegah komunikasi langsung antara titik-titik tertentu dalam jaringan. Pihak yang dapat menjembatani atau mengeksploitasi lubang tersebut dapat menggunakan posisi mereka sebagai sumber kekuatan dengan mengendalikan komunikasi antar pihak. Aspek lain dari jaringan yang berhubungan dengan power adalah sifatnya yang berkepanjangan. Meskipun ikatannya lemah, dapat berguna dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi yang baru inovatif. Hubungan yang lemah menyediakan untuk menghubungkan kemampuan kelompok-kelompok yang berbeda dalam caracara yang kooperatif. Hal ini meningkatkan

kemampuan negara untuk meningkatkan power secara bersama ketimbang diatas yang lain. Kemampuan untuk menciptakan jaringan kepercayaan yang memungkinkan kelompok untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama adalah apa yang disebut oleh Kenneth Boulding sebagai "integrative power".

Ahli teori politik Hannah Arendt menyatakan bahwa "power meningkat jauh ketika orang-orang bekerja sama". Hal yang serupa dapat berlaku pada negara, negara dapat memiliki kekuatan global dengan menjalankan dan bekerjasama dengan negara lain. John Ikenberry berpendapat bahwa kekuatan Amerika setelah Perang Dunia ke-2 berada pada jaringan institusi yang membatasi Amerika Serikat namun terbuka untuk negara lain dan kemudian meningkatkan kekuatan Amerika untuk bertindak bersama dengan negara lain. Hal ini merupakan penting dalam menilai kekuatan dari bangsa dalam sistem internasional sekarang dan dimensi penting untuk menilai masa depan dari kekuatan Amerika Serikat dan Cina. Sebagai contoh, jika Amerika Serikat terlibat dalam lebih banyak jaringan komunikasi, Amerika Serikat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk membentuk pilihan dalam hal aspek ketiga dari power.

Untuk tujuan perumusan kebijakan, hal ini dapat berguna untuk memperhatikan ketiga aspek dari power dalam urutan terbalik dari yang dicetuskan oleh para ahli ilmu sosial. Seorang pembuat kebijakan harus memperhatikan pilihan-pilihan yang mungkin diambil dan pembentukan agenda sebagai cara membentuk lingkungan sebelum beralih pada aspek pertama dari power. Pendeknya, mereka yang cenderung untuk menghilangkan aspek kedua dan ketiga menjadi aspek pertama dari power akan kehilangan aspek dari power yang makin penting pada abad ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Power dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Dalam perjanjian perdagangan internasional, masing-masing aktor yang terlibat didalamnya melakukan perundingan perjanjian perdagangan secara sukarela, yang membuat relasi power diantara aktor-aktor tersebut terlihat tidak relevan. Melakukan perundingan perdagangan internasional memungkinkan barang dan jasa dari negara lain masuk kedalam suatu negara, adalah menguntungkan jika negara tersebut belum dapat menyediakan barang atau jasa yang dihasilkan negara lain, dan memungkinkan barang atau jasa dari negara tersebut diekspor ke negara mitra. Apabila hal ini diterapkan pada dua negara dengan kekuatan ekonomi setara dan produk yang dihasilkan kedua negara tersebut adalah berbeda dan saling melengkapi maka kedua negara tersebut akan mendapat keuntungan dari dibukanya perjanjian perdagangan internasional. Namun jika perjanjian dilakukan antar negara industri maju dengan negara berkembang, dimana industri didalam negara berkembang masih dalam tahap pengembangan, argumen yang selalu muncul adalah liberalisasi perdagangan akan membawa industri negara berkembang kedalam persaingan yang sehat, menjadikan industri dalam negeri menjadi lebih efisien sehingga dapat bersaing pasaran internasional. Seringkali yang terjadi adalah, produk dari negara berkembang tidak dapat bersaing dengan produk luar negeri yang masuk, dan berakibat industri domestik menjadi tidak berkembang.

Dalam konteks perdagangan internasional, suatu negara tentu menginginkan agar produk-produk yang dihasilkannya, barang dan jasa, dapat dikonsumsi didalam negeri serta diekspor. Apabila negara tersebut tidak dapat menghasilkan suatu barang atau jasa, dan terjadi kelebihan produksi dalam negeri, maka pilihan yang paling mudah adalah melakukan perdagangan internasional. Mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat disediakan di dalam

negeri, dan mengekspor kelebihan produksi domestik.

berkembang Negara-negara seringkali mengandalkan ekspor barang mentah dan memiliki industri manufaktur yang masih berkembang, dalam perjanjian perdagangan internasional negara-negara berkembang akan mendapatkan akses untuk menjual bahan mentah yang dihasilkannya dan menjadi pasar bagi produk-produk manufaktur negara-negara indsutri maju, demikian juga untuk sektor jasa. Hal ini mengakibatkan produk-produk dari negara berkembang harus bersaing didalam negeri sendiri dengan produk-produk dari negara-negara industri maju yang memiliki desain dan kualitas yang lebih baik, serta skala ekonomi yang lebih efisien produksinya. Atau jika menurut argumentasi dari pendukung perdagangan bebas, jika tedapat industri serupa yang lebih efisien di luar negeri dan mengalahkan industri lokal, maka industri lokal yang produksinya kalah bersaing dapat memindahkan sumberdayanya ke industri yang lebih produktif dan efisien. Namun pada kenyataannya memindahkan bidang produksi tidak mungkin terjadi secara mudah dan cepat, mesin-mesin tidak mungkin diubah untuk memproduksi barang lain, para pekerja yang terbiasa untuk memproduksi suatu barang tidak dapat begitu saja memiliki kemampuan untuk memproduksi barang lain. Sehingga, pabrik dan mesin akan terbengkalai, pengangguran meningkat, dan masalah lainnya yang akan membebani pemerintah (Paul, 2015).

Sementara dalam perspektif ekonomi nasionalis, industri suatu negara harus dibangun terlebih dahulu agar dapat kompetitif dan dapat bersaing dengan industri yang lebih maju. Apabila negara berkembang hanya mengambil keuntungan dari perdagangan bahan mentah saja, maka keuntungan akan terus diambil oleh negara-negara industri maju yang dapat memberikan nilai tambah terhadap bahan mentah. Oleh karena itu suatu negara perlu untuk memperkuat industri dalam

negerinya terlebih dahulu sebelum membuka pasar dalam negerinya (Levi-Faur, 1997).

Sementara perjanjian perdagangan bebas memberikan janji bahwa liberalisasi pasar dalam negeri akan membawa teknologi baru, persaingan usaha sehingga industri dalam negeri akan lebih efisien sehingga industri dalam negeri akan tumbuh secara pesat. Berdasarkan ha1 inilah negara-negara berkembang bersedia untuk melakukan perundingan perdagangan internasional dan membuka jalan bagi negara-negara industri maju untuk mengambil keuntungan dari keterbukaan pasar global.

Peranan Institusi sebagai Perpanjangan Power Negara Maju

Keberadaan institusi internasional terlepas dari peran negara-negara industri maju sebagai pendirinya. Institusi internasional seringkali dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan negara-negara maju dan memberikan semacam legitimasi bagi negara-negara maju dalam setiap tindakannya dalam politik global. Peran dari negara-negara maju dalam meletakkan dasar pada pengaturan institusi atau rejim internasional merupakan keberhasilan dari negara maju dalam meyakinkan negara anggota lain. Keyakinan ini diperkuat dengan aturan domestik yang mapan, pengetahuan dan informasi yang komprehensif akan isu-isu dinegosiasikan, dan pengalaman serta teknik akan negosiasi yang sangat banyak (Wang, 2019).

Pendekatan politik internasional Barat setelah negara-negara berakhirnya perang dingin berdasarkan pada kepercayaan bahwa institusi merupakan kunci untuk mempromosikan perdamaian dunia. Pembuat kebijakan negara-negara Barat mengklaim bahwa institusi yang "melayani Barat dengan baik" sebelum runtuhnya Uni Sovyet harus dibentuk ulang untuk mengarahkan Eropa Timur juga. Waren Christopher, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Bill Clinton, menyatakan "tidak ada alasan, mengapa institusi-institusi atau aspirasi kita harus berhenti di garis depan dari perang dingin". Institusi yang dimaksud oleh Christopher adalah Komunitas Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Konferensi mengenai Keamanan dan Kerjasama Eropa, dan Uni Eropa Barat. Tidak ada institusi yang diharapkan untuk mendominasi di Eropa, tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka institusi yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Lebih lanjut Christopher "kita dapat menyatakan meningkatkan kemanan Eropa yang lebih tahan lama melalui struktur yang saling mengunci, masing-masing dengan peran dan kekuatan yang saling melengkapi. Tidak ada kawasan lain di dunia yang memiliki institusi yang sangat ekstensif dan terbangun dengan baik seperti di Eropa. Sehingga, pembuat kebijakan Barat menyuarakan pentingnya membuat jejaring institusi yang saling melengkapi diluar Eropa. Penekanan khusus diberikan untuk Asia, dimana hanya ada beberapa institusi yang relatif lemah, dan kekahwatiran akan Jepang, diiringi dengan kebangkitan China dan kemungkinan menurunnya kehadiran Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas di Asia bagi sebagian pengamat. Terdapat juga perhatian dunia akademis. Para ahli mengenai institusi memandang institusi sebagai kekuatan penting bagi stabilitas. Robert Keohane menyatakan bahwa "menghindari konflik militer di Eropa setelah perang dingin sangat bergantung pada kerjasama yang terinstitusionalisasi" (Mearsheimer, 1994-1995, hal. 5-6).

Mearsheimer mendefinisikan institusi sebagai serangkaian aturan yang mengatur bagaimana negara-negara bekerjasama dan bersaing satu sama lain. Mereka menentukan bagaimana negara berperilaku, dan melarang perilaku tertentu. Aturan-aturan ini dirundingkan oleh negara-negara, dan menurut banyak banyak ahli, mereka mengharuskan penerimaan bersama dari norma-norma yang lebih tinggi, yang merupakan "perilaku standar dalam hal hak dan kewajiban". Peraturanperaturan ini dibakukan dalam perjanjian

internasional, dan biasanya berbentuk organisasi dengan personil dan anggaran tersendiri. Meskipun aturan biasanya dijadikan dasar dari organisasi internasional, bukanlah organisasi yang memaksa negara-negara untuk mematuhi peraturan. Institusi bukanlah semacam pemerintahan dunia. Negara sendirilah yang memilih untuk mematuhi aturan-aturan yang mereka buat. Secara singkat, institusi meminta untuk "kerjasama terdesentralisasi dari masing-masing negara berdaulat, tanpa mekanisme komando yang efektif (Mearsheimer, 1994-1995, hal. 8-9).

Mearsheimer menambahkan, negara yang memikirkan mengenai kerjasama memperhatikan bagaimana keuntungan akan didistribusikan diantara negara-negara. Pembagian keuntungan akan diperhatikan dengan dua cara. Pertama dengan memperhitungkan keuntungan absolut, yang berarti masing-masing pihak fokus pada memaksimalkan keuntungannya sendiri, dan tidak memperdulikan seberapa banyak pihak lain mendapatkan keuntungan atau kerugian dari kesepakatan. Masing-masing pihak akan peduli terhadap pihak lain hanya jika perilaku pihak lain mempengaruhi kemungkinan diri mencapai dalam mereka keuntungan maksimum. kedua, Cara negara-negara memperhatikan keuntungan relatif, berarti masing-masing pihak tidak hanya memperhatikan keuntungannya sendiri, namun memperhatikan seberapa juga baik keuntungannya jika dibandingkan dengan pihak lain (Mearsheimer, 1994-1995, hal. 12).

Negara yang paling kuat dalam sistem menciptakan dan membentuk sehingga mereka dapat mempertahankan atau meningkatkannya powernya di dunia (Mearsheimer, 1994-1995, hal. 13). Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana Amerika Serikat sebagai pemenang perang dunia kedua, yang juga merupakan negara industri maju, membentuk General Agreement on Tariffs and Trade, yang kemudian digantikan oleh WTO, International Monetary Fund, dan Bank Dunia sebagai institusi yang

mengatur perekonomian global (Muzaffar, 2015).

mengamati Lisa Martin peran Komunitas Eropa selama Perang Falklands dengan membantu membujuk sekutu Inggris yang semula enggan untuk meneruskan sanksi ekonomi terhadap Argentina setelah tindakan militer dimulai. Kesimpulan Martin menyatakan bahwa EC membantu Inggris dalam memastikan kerjasama sekutu Inggris dengan menurunkan biaya transaksi dan memfasilitasi keterkaitan isu. Secara garis besar, Inggris membuat konsesi pada anggaran dari EC dan Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy); sebagai sekutu gantinya, **Inggris** setuju untuk meneruskan sanksi pada Argentina. Usaha Inggris agar EC tetap menerapkan sanksi pada Argentina tidak disebabkan karena adanya ketakutan dari masing-masing pihak untuk bertindak curang. Adalah relatif mudah bagi dan sekutunya untuk mecapai kesepakatan dalam hal ini, karena tidak ada kepentingan mendasar dari masing-masing pihak yang terganggu, dan kedua belah pihak tidak mengorbankan hal yang signifikan untuk hal ini. mencapai kesepakatan untuk sanksi terhadap meneruskan Argentina bukanlah hal yang sulit (Mearsheimer, 1994-1995, hal. 25).

Serikat seringkali Amerika dikatakan sebagai kekuatan hegemon. Untuk mempertahankan perdamaian tidak dapat selalu bergantung pada kekuatan militer. Mempromosikan demokrasi, memperdalam hubungan dari perdagangan internasional, dan memperluas jejaring multilateral melalui organisasi antar negara menawarkan kemungkinan untuk memperkuat hubungan yang damai dan memperluas cakupan Amerika Serikat ke seluruh dunia. Dengan mengurangi ketergantungan akan kekuatan militer dan mengedepankan soft-power Amerika Serikat dapat bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sah dan mengikuti aturan-aturan yang disepakati. Hal tersebut dapat memenuhi kepentingan Amerika Serikat dan banyak negara serta orang lain (Russet, 2013).

Terdapat kesulitan dalam mendesain institusi internasional. Kesulitan yang utama tawar-menawar. adalah proses Untuk mencapai kesepakatan bersama, negara-negara membutuhkan peraturan dan prosedur yang umum dan standar. Dengan menyamakan aturan dan prosedur, institusi mereleksikan batasan bersama akan perilaku dan untuk kolektif. mencapai tujuan Kerjasama membutuhkan internasional manapun rangkaian negosiasi yang besar, seringkali diantara sejumlah besar negara dengan sumber daya dan kepentingan yang berbeda-beda. Kekhasan dan keteraturan dari prosedur tawarmenawar juga bervariasi berdasarkan area isu dan institusi yang mengaturnya, sehingga terdapat juga variasi akan bagaimana suatu institusi mencapai tujuannya. Adalah jelas bahwa negara-negara dengan kekuatan besar memiliki pengaruh lebih dalam negosiasi internasional dan juga hasil dari negosiasi. Barbara Koremenos, Charles Lipson, dan Duncan Snidal menemukan sejumlah fitur desain utama yang memiliki dampak terhadap hasil dari proses tawar-menawar. Salah satunya adalah lingkup dari isu dari negosiasi, hal akan isu mana yang akan dibahas, dan peraturan untuk mengatur bagaimana keputusan akan diambil (termasuk aturan mengenai pengambilan suara) (Sterling-Folker, 2013).

Terdapat beberapa kritik mengenai Institusi Ekonomi Global seperti World Organisation (WTO), bahwa institusi-institusi tidaklah demokratis. Pertama, pembatasan akan kedaulatan negara dalam hal otoritas dan kekuatan dari otoritas nasional dirusak oleh aktifitas Institusi Ekonomi Global ini. persyaratan-persyaratan yang diberlakukan oleh institusi-institusi ini mengakibatkan pemerintahan negara dan warganya harus tunduk kepada bentuk baru dari peraturan dimana mereka tidak memiliki kendali atasnya (Kelton, 2012).

Pengaturan global merupakan kombinasi dari nilai, aturan, norma, prosedur, praktik, kebijakan, dan organisasi dari berbagai jenis yang diharapkan menghadirkan keteraturan global, stabilitas, dan prediktabilitas (Chidozie & Aje, 2017). Institusi internasional dalam melakukan pengaturan mengenai bidang yang ditanganinya anggota-anggotanya, dan memerlukan suatu tata kelola yang disepakati bersama yang seringkali dikendalikan oleh negara-negara maju dimana tata kelola tersebut disesuaikan dengan keinginan dan kebiasaan negara-negara maju melalui apa yang disebut oleh Thorsten Wojczewski sebagai "Discursive Hegemony" (Wojczewski, 2018).

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa institusi global bentukan dari negara-negara maju merupakan alat dan sarana bagi negaranegara maju dalam memperluas mempertahankan pengaruhnya. Negara-negara dikarenakan berkembang membutuhkan negara-negara maju dengan perekonomian yang lebih kuat dan dapat memberikan bantuan, baik berupa bantuan ekonomi maupun teknis, seringkali harus terlibat dan menjadi anggota dari institusi-institusi tersebut. Keterlibatan dan keanggotaan pada institusi global mengharuskan negara-negara berkembang menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku pada institusi yang dituju dan bisa jadi mengorbankan sebagian kepentingan nasional mereka.

Scott Burchill dan Joseph E. Stiglitz menjelaskan bagaimana negara-negara industri maju menggunakan kerangka perjanjian perdagangan bebas internasional untuk berkembang. mengikat negara-negara Sementara, pada saat yang bersamaan, negaramaju melakukan hal-hal negara yang bertentangan dengan norma-norma perdagangan bebas yang mereka buat untuk kepentingan nasionalnya.

Burchil memandang terdapat pengikisan terhadap aturan mengenai perdagangan multilateral pada era setelah perang dunia ke2. Meskipun terdapat pengurangan pada hambatan perdagangan didalam blok-blok perdagangan seperti Uni Eropa dan North American Free Trade Agreement (NAFTA),

terjadi kenaikan hambatan perdagangan antar blok. Tarif memang turun tapi digantikan oleh serangkaian hambatan non tarif yang lebih luas, termasuk kuota impor dan perjanjian untuk membatasi secara sukarela. Hal ini merupakan isu bagi negara-negara kecil yang yang tidak mampu menyamai subsidi diberikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Pemberian subsidi terhadap petani di Eropa adalah sebesar 43 Milliar Euro tahun 2008 melalui Common pada Agricultural Policy (CAP), dan di Amrika Serikat **Undang-Undang** Pertanian menyediakan subsidi sebesar 190 miliar Dollar Amerika Serikat kepada petani selama sepuluh tahun (Kelton, 2012). Negara-negara tersebut mengadopsi doktrin perdagangan bebas, disisi lain negara-negara industri maju menerapkan kebijakan yang berlawanan. hal ini menyebabkan negara-negara kecil akan menempatkan diri mereka dalam posisi yang rentan di ekonomi dunia. Namun, meskipun hambatan tarif dan non-tarif dihilangkan, pasar dunia tidak sepenuhnya bebas, karena kekuatan dari perusahaan transnasional untuk mengendalikan dan mendistorsi pasar melalui transfer pricing dan cara-cara lain (Burchill, 2005).

Luke Uka Uche menjabarkan hal ini contoh Ghana yang merupakan ekportir terbesar coklat dan penghasil 10% emas dunia, mengalami hambatan pembangunan ketika negara industri barat mengendalikan harga komoditas-komoditas tersebut. Ghana merupakan penghasil bahan mentah bagi negara-negara industri maju dan menjadi konsumen bagi barang-barang manufaktur hasil olahan dari bahan-bahan mentah yang dihasilkannya (Uche, 1994).

Lebih lanjut Burchill menyatakan bahwa peningkatan jumlah perjanjian dan organisasi perdagangan bebas seperti NAFTA, APEC, dan WTO serta meningkatnya nilai dari organisasi internasional seperti G8, IMF, dan Bank Dunia merupakan indikasi dari pengaruh neo-liberalisme pada periode paska perang dunia ke-2. Organisasi-organisasi ini adalah

badan transnasional kuat yang merupakan perwujudan ideologi perdagangan bebas. Bagi para pendukungnya, organisasi-organisasi ini menyediakan bagi negara-negara berkembang satu-satunya kesempatan untuk dengan mengatasi kesulitan finansial memodernisasi ekonominya. Bagi para pengkritiknya, mereka memaksakan pasar bebas pada negara-negara berkembang. Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi menformalkan yang dan membentuk hubungan pasar antar negara. Dengan mengunci negara-negara berkembang kedalam perjanjian yang memaksa mereka untuk menurunkan batasan proteksi mereka, misal NAFTA dan WTO mencegah negaranegara di belahan dunia Selatan untuk mengembangkan profil perdagangan mereka yang berbeda dari model yang dibuat yang seharusnya menjadi "keunggulan komparatif" mereka. IMF dan Bank Dunia menyediakan bantuan keuangan (atau lebih tepatnya hutang) negara-negara berkembang persyaratan pada penerimaan mereka akan perdagangan bebas aturan untuk perekonomiannya dengan sebutan "Structural Adjusment Policies" (Burchill, 2005).

pengkritik menverang institusiinstitusi ini karena melegitimasi hanya satu bentuk tatanan, berdasarkan hubungan pasar yang tidak setara. Terutama, institusi-insitusi ini memberikan resep yang sama bagi pengembangan ekonomi untuk semua negara, tanpa memandang keadaan yang terjadi di masing-masing negara. Negara-negara berkembang diharapan menganut cetak biru pasar bebas (yang biasa disebut "Washington Consensus") – membuka perekonomiannya bagi investasi asing, deregulasi finansial, pengurangan belanja negara dan defisit neraca, privatisasi badan usaha milik negara, penghapusan proteksi dan subsidi. mengembangkan ekonomi yang berorientasi ekspor – atau beresiko pengurangan bantuan keuangan. Dan karena diharuskan untuk menghilangkan kendali negara akan pergerakan modal – yang memungkinkan bagi negara untuk menarik kesimpulan sendiri mengenai investasi dan prioritas belanja – arah pembangunan ekonomi mereka menjadi semakin diatur oleh pasar keuangan tanpa bentuk yang bertindak berdasarkan kesempatan meraih keuntungan dibanding pertimbangan kepentingan nasional atau umum (Burchill, 2005).

Argumen yang mendukung perdagangan bebas masih sangat kuat, dengan berdasarkan pada efisiensi ekonomi dan sebagai satusatunya cara dari mengintegrasikan negaranegara berkembang kedalam ekonomi global yang lebih luas. Proteksionisme di belahan dunia Utara dikatakan tujuan utamanya adalah dunia untuk merusak Selatan dengan mengeluarkan perekonomian mereka dari pasar di negara-negara maju, lalu menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk memodernisasi ekonominya. Bagi pemain perdagangan bebas vang sudah maju, seringkali tidak resiprokal dan merupakan senjata ideologis untuk mengatur pembangunan ekonomi dari masyarakat kelas bawah. Retorika mereka terhadap kemurnian dari prinsip-prinsip pasar seringkali tidak sesuai dengan perilaku ekonomi mereka. ini, Kecenderungan bersamaan dengan perubahan mendasar dari struktur ekonomi dunia dan bentuk dari perdagangan internasional, menimbulkan keraguan akan bagaimana liberalisme menjelaskan globalisasi ekonomi dunia (Burchill, 2005).

Joseph E. Stiglitz berpendapat pada tahun 2006, bahwa meskipun terjadi perdagangan yang bebas dan adil, tidak semua negara dan orang akan mendapat keuntungan. Meskipun batasan perdagangan dihilangkan, tidak semua orang berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan baru ini. sangat mudah bagi mereka yang berada dalam negara-negara industri maju untuk mengambil kesempatan dari pembukaan pasar di negaranegara berkembang. Namun, terdapat banyak hambatan bagi mereka di negara-negara berkembang. Seringkali kurangnya infrastruktur untuk menjual barang-barang mereka di pasar, dan mungkin membutuhkan

waktu yang lama bagi produk mereka untuk memenuhi standar yang diminta oleh negaranegara maju. NAFTA merupakan contoh bagaimana liberalisasi perdagangan hanya menguntungkan negara-negara maju. Ketimpangan antara Amerika Serikat dan Mexico justru meningkat setelah 10 tahun penerapannya. NAFTA malah membuat Mexico makin bergantung kepada Amerika Serikat, yang berarti jika ekonomi Amerika Serikat mengalami kemunduran maka Mexico juga mengalami kemunduran. NAFTA juga dikatakan berkontribusi terhadap kemiskinan Mexico. Petani jagung Mexico berkompetisi dengan jagung asal Amerika yang disubsidi. Meskipun Amerika Serikat tidak menghapus seluruh subsidinya, Mexico seharusnya diberikan hak untuk menyeimbangkannya dengan menerapkan tarif pada barang impor dari Amerika Serikat untuk mengimbangi subsidi, namun mekanisme NAFTA tidak mengijinkannya.

Ketika NAFTA menghilangkan tarif, masih memungkinkan adanya serangkaian hambatan non-tarif. Setelah NAFTA disepakati, Amerika Serikat terus menggunakan hambatan non-tarif untuk menghalangi produk-produk Mexico yang mulai memasuki pasar Amerika Serikat (Stiglitz, 2006).

Industri dari negara-negara berkembang membutuhkan waktu seringkali untuk berkembang, dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing; dalam jangka waktu ini negara-negara harus melindungi industri baru mereka. Argumen standar dari perdagangan bebas adalah pada efisiensi. Lebih banyak barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang ada jika masing-masing negara fokus pada keunggulan komparatif mereka. Namun yang lebih penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan di negaranegara berkembang adalah seberapa cepat mendapatkan pengetahuan teknologi dari negara-negara maju. Negaranegara berkembang tidak hanya ketinggalan dalam hal sumber daya namun juga dalam hal teknologi. Ketertinggalan dalam pengetahuan ini merupakan faktor penghambat dari kemajuan negara-negara berkembang, sehingga menutup kesenjangan pengetahuan lebih penting dibanding meningkatkan efisiensi atau meningkatkan modal yang tersedia. Seperti Korea Selatan pada saat mulai memproduksi baja, memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras. Meskipun Korea Selatan menjadi produsen beras yang paling efisien, pendapatan mereka akan tetap terbatas. Pemerintah Korea Selatan menyadari jika ingin sukses menjadi negara maju, harus perekonomiannya dari pertanian menjadi negara industri.

Jika negara berkembang memasuki era industrialisasi, industri baru mereka harus diproteksi sampai cukup kuat untuk berkompetisi dengan industri dari negara maju vang sudah lebih mapan dan Kebanyakan negara industri maju pada awalnya berkembang karena batasan proteksi ini, para pengkritik globalisasi menuduh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang menjadi maju dengan cara ini ingin melarang negara-negara berkembang menggunakan cara yang sama (Stiglitz, 2006, hal. 70-71).

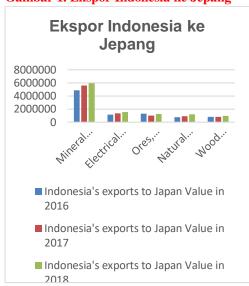
Putaran Uruguay, yang menghasilkan pembentukan WTO, dikenal sebagai "tawar menawar besar" dimana negara-negara maju berjanji untuk meliberalisasikan perdagangan di bidang pertanian dan tekstil (yang merupakan bidang padat karya dan merupakan kepentingan dari eksportir di negara-negara berkembang), dan sebagai balasannya negaranegara berkembang setuju untuk mengurangi tarif dan menerima serangkaian aturan dan kewajiban baru mengenai hak kekayaan intelektual, investasi, jasa. dan perkembangannya, negara-negara maju tidak memenuhi janjinya, kuota import tekstil tetap ada dan tidak terlihat adanya penghapusan subsidi di bidang pertanian dari negara-negara Selama 40 tahun, liberalisasi perdagangan menitikberatkan pada pembukaan pasar pada barang-barang manufaktur – pada awalnya merupakan keunggulan komparatif dari Amerika Serikat dan Eropa.

Selama masa itu pula, para juru runding bekerja untuk membuka pasar bagi China, yang mengalami kemajuan dalam industri manufaktur. Sehingga Amerika Serikat dan Eropa mulai merambah bidang jasa yang menyumbang 70% dari perekonomian Amerika Serikat, Eropa serta Jepang mendekati angka yang sama, dan juga dalam bidang hak kekayaan intelektual memuaskan publiknya (Stiglitz, 2006, hal. 77).

Sebagaimana sistem politik, WTO mencerminkan kepentingan dari negara-negara kuat. Pembentukannya merupakan cerminan dari kepentingan kekuatan hegemon pada saat itu, Amerika Serikat; penguatannya pada masa perang dingin mencerminkan kepentingan yang semakin besar dari Eropa dan Jepang bahwa liberalisasi perdagangan menjanjikan 2012). keuntungan yang besar (Oatley, Negara-negara industri maju juga dapat dengan mudah memasukkan agenda-agenda mendukung kepentingannya. pertemuan tingkat menteri di Bulan Desember 2015, Amerika Serikat menginisiasi perluasan negosiasi perdagangan agenda dengan mengajukan kembali isu-isu yang dikeluarkan sewaktu Putaran Doha. Dengan demikian terlihat bahwa negosiasi perdagangan internasional dapat dirusak oleh kepentingan dari negara-negara kuat (Sundaram, 2017). Meskipun pada perkembangannya makin banyak negara di dunia yang menjadi WTO kebanyakan merupakan dan negara berkembang, hal ini bukan berarti WTO berhasil dan memiliki aturan main yang secara sama bagi negara-negara berlaku anggotanya. Hal ini lebih merupakan karena negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan akses penjualan komoditas ekspor mereka. Meskipun ada beberapa negara berkembang yang berhasil memanfaatkan pembukaan pasar mereka dalam proses liberalisasi seperti China, Vietnam, dan Singapura, keberhasilan negaranegara tersebut dapat dikategorikan sebagai aspek ketiga dari power sebagaimana yang dikemukakan oleh Nye, efek kota yang gemilang diatas bukit, dan membuat semua tertarik mengikutinya.

Data-data berikut memberikan gambaran bagaimana narasi mengenai "keunggulan komparatif" merupakan hambatan bagi negaranegara berkembang dalam memajukan industri dalam negerinya. Data yang dipilih adalah hubungan ekpor-impor antara Ghana-Belgia dan Indonesia-Jepang, dimana hubungan diantara negara-negara tersebut adalah serupa antara negara berkembang dengan negara bekas penjajahnya yang merupakan negara industri maju.

Gambar 1. Ekspor Indonesia ke Jepang



(www.trademap.org, 2019)

Gambar 2. Impor Indonesia ke Jepang



(www.trademap.org, 2019)

Gambar 3. Ekspor Ghana ke Belgia



(www.trademap.org, 2019)

Gambar 4. Impor Ghana dari Belgia



(www.trademap.org, 2019)

Melihat data di atas terlihat bahwa negaranegara berkembang lebih banyak sebagai
penghasil bahan mentah untuk negara-negara
maju. Sementara negara-negara berkembang
membeli barang-barang manufaktur yang
memiliki nilai jual tinggi dari negara-negara
maju. Hal ini terjadi sejak sekian lama, negaranegara berkembang kesulitan untuk
mengembangkan industri dalam negerinya dan
banyak bergantung pada ekspor bahan mentah.

Dua dari banyaknya protes akan liberalisasi perdagangan adalah, pertama pada liberalisasi akan tenaga kerja tidak terlatih, yang akan meningkatkan efisiensi global, dibanding liberalisasi tenaga kerja terlatih seperti juga liberalisasi jasa keuangan, namun para juru hanya memperhatikan runding liberalisasi jasa tenaga kerja terlatih. Kedua, penguatan pada hak kekayaan intelektual hanya menguntungkan negara-negara maju. Amerika Serikat dan Eropa telah menguasai seni berdebat untuk perdagangan bebas bersamaan dengan mengembangkan perjanjian perdagangan yang melindungi diri mereka akan impor yang berasal dari negara-negara berkembang. Kesuksesan dari negara-negara maju ini adalah pada penentuan agenda, mereka menyusun agenda sedemikian rupa sehingga pasar terbuka pada barang dan jasa dimana mereka memiliki keunggulan komparatif (Stiglitz, 2006, hal. 77-79).

Meskipun tarif import sudah dihapuskan, negara-negara maju memiliki banyak cara untuk menghalang-halangi produk dari negaranegara berkembang masuk kedalamnya. Pertama adalah safeguards, merupakan pengenaan tarif secara sementara jika suatu negara mengalami peningkatan import barang tertentu dalam jumlah besar, digunakan terutama untuk melindungi industri dalam negeri sehingga memberikan waktu yang cukup bagi industri dalam negerinya untuk melakukan penyesuaian, efisiensi atau bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan baru. Kedua, tarif dumping, tarif terhadap dumping dapat diberlakukan secara permanen. Tarif dumping dikenakan kepada produk-produk yang dijual dibawah harga produksi. Ketiga, batasan teknis, merupakan aturan teknis dimana pemerintah menggunakannya dalam rangka melindungi warga negaranya. Keempat, rules of origin, merupakan aturan dimana suatu negara memastikan asal dari barang yang diimpor harus benar-benar berasal dari mitra dagangnya (Stiglitz, 2006, hal. 94-96).

KESIMPULAN

negara-negara maju menggunakan mekanisme perdagangan internasional untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dengan negaranegara berkembang. Serangkaian aturan yang dibuat dalam mekanisme perdagangan internasional yang berlaku pada saat ini lebih menguntungkan bagi negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya dalam bidang industri manufaktur, bahkan pada bidang pertanian yang dikatakan merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, negara maju menggunakan berbagai cara untuk mencegah produk-produk pertanian dari negara-negara berkembang memasuki negaranya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional kedua merupakan aspek dari power sebagaimana yang dijelaskan oleh Nye.

Sementara untuk aspek ketiga, perdagangan internasional menjanjikan perkembangan. Liberalisasi perdagangan akan menuntun negara-negara berkembang tersebut menuju efisiensi dan memperkuat keunggulan komparatif mereka. Uni Eropa merupakan contoh yang digunakan bagaimana liberalisasi perdagangan akan bermanfaat untuk semua. Padahal kondisi pada Uni Eropa berbeda dengan belahan dunia lain. Eropa memiliki tingkat pertumbuhan, ekonomi dan industri, yang relatif sama, sehingga Uni Eropa merupakan jaringan dimana negara-negara anggota di dalamnya akan saling melengkapi. Sementara untuk liberalisasi perdagangan dimana terdapat kesenjangan tingkat ekonomi industri. negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah biasanya hanya akan menjadi pasar bagi negara dengan tingkat yang lebih maju.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi dengan perdagangan bebas adalah memperkuat industri dalam negeri. Negara-negara berkembang terlebih dahulu sedapat mungkin bisa memenuhi sendiri kebutuhan dasar mereka. Kedua, negara berkembang harus fokus pada pengembangan industri dalam negeri, terutama yang bisa mereka produksi sendiri. Negara-negara berkembang sebisa mungkin memanfaatkan bahan baku tersedia di dalam negeri, mengembangkan industri yang memberikan nilai tambah dari bahan baku tersebut. Ketiga, memperkuat aturan dalam negeri dengan memperhatikan pengaturan-pengaturan dari institusi internasional dimana mereka terlibat. Keempat, dalam melakukan perundingan perjanjian sebisa mungkin memperoleh manfaat dari negara maju terutama dalam hal teknologi baru dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang untuk efisiensi industri mereka.

Meskipun institusi internasional mekanisme yang berlaku dalam tataran perdagangan dunia sangat dikuasai oleh Menarik negara-negara maju. diri perundingan atau kesertaan dalam institusi internasional bukanlah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah negara-negara Aturan main yang berlaku berkembang. memang sulit untuk dirubah, negara-negara berkembang masih dapat memanfaatkan institusi aturan-aturan dari perdagangan melindungi internasional untuk memperkuat industri dalam negeri tanpa melanggar aturan-aturan dari institusi perdagangan internasional tersebut. Kemudian, dalam menghadapi perundingan perjanjian kerjasama perdagangan yang sedang berjalan, pemerintah negara-negara berkembang hendaknya lebih berhati-hati dalam mengikatkan dirinya dalam perjanjian, dan menyasar sektor-sektor yang dapat menguntungkan mereka serta dapat membuka sektor-sektor yang tidak atau belum dapat disediakan di dalam negeri kepada negara mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Burchill, S. (2005). *Theories of International Relations 3rd ed.* New York: Palgrave MacMillan.
- Chidozie, F., & Aje, O. O. (2017). International Organization and Global Governance Agenda. *Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales*, 43-60.
- Kelton, M. (2012). Global Trade. Dalam R.
 Devetak, A. Burke, & J. George, An Introduction to International Relations 2nd Edition (hal. 352). Cambridge: Cambridge University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence*. Boston: Longman.
- Levi-Faur, D. (1997). Friedrich List and The Political Economy of the Nation-State. *Review of International political Economy*, 167.
- Mearsheimer, J. J. (1994-1995). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 5-6.
- Muzaffar, C. (2015). The Decline of US Helmed Global Hegemony: The Emergence of A More Equitable Pattern of International Relations? *The Journal of Defence and Security*, 101-119.
- Nye, Jr., J. S. (2011). *The Future of Power*. New York: Public Affairs.
- Oatley, T. (2012). *International Political Economy 5th Ed.* Boston: Pearson Education Inc.
- Paul, J. R. (2015). The Cost of Free Trade. Brown Journal of World Affairs, 197-198.
- Russet, B. (2013). Liberalism. Dalam T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd ed (hal. 110-111). Oxford: Oxford University Press.
- Sterling-Folker, J. (2013). Neoliberalism. Dalam T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd ed (hal. 120-121). Oxford: Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work*. New York: Norton & Company, Inc.
- Sundaram, J. K. (2017). Free Trade Agreements, Trade Policy and Multilateralism. Society for International Developments, 46.
- Uche, L. U. (1994). Some Reflections on the Dependency Theory. *Africa Media Review*, 47.

Padjadjaran Journal of International Relations e-ISSN: 2684-8082 Vol. 2 No. 1, Mei 2020 (3-17) doi: 10.24198/padjir.v1i1. 25602

Wang, Y. (2019). Power of Discourse in Free Trade Agreement Negotiation. Leiden Journal of International Law, 440.

Wojczewski, T. (2018). Global Power Shift and World Order: The Contestation of "Western" Discursive Hegemony. Cambridge Review of International Affairs, 33-52.

www.trademap.org. (2019, Mei 7).